

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Kata "implementasi" adalah akar kata bahasa Inggris "implementasi". Sebaliknya, untuk menerapkan (*implement*) menyiratkan untuk memberikan efek praktis untuk (memiliki dampak atau efek pada sesuatu) dan untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), menurut Kamus Besar Webster (Rusdiana, 2021:126).

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk otoritas atau kelompok publik dan swasta, dengan tujuan mewujudkan tujuan yang dinyatakan dalam pilihan kebijakan. Menurut Edward, implementasi adalah suatu tahapan dari proses pembuatan kebijakan yang terjadi antara tahapan perancangan kebijakan dengan hasil atau efek yang akan dihasilkan oleh kebijakan tersebut (*output, outcome*) (Tjilen, 2019:30).

Salah satu langkah dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan untuk kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat umum adalah implementasi kebijakan (Nurkaidah, 2022:36).

Wahab dalam Setiadi (2005) mengutip pandangan para ahli yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan melibatkan jaringan variabel politik, ekonomi, dan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung

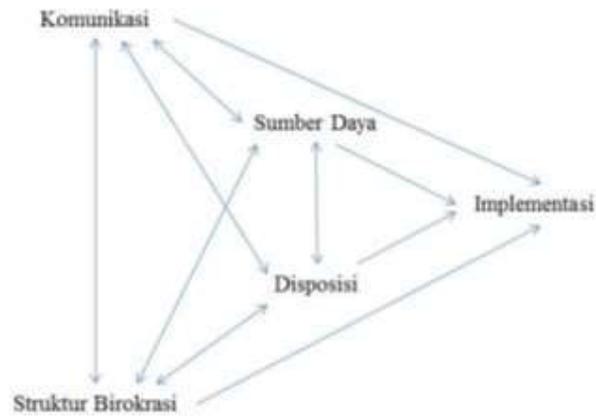
mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berdampak positif dan negatif. Entitas administratif yang bertugas melaksanakan program dan mendorong kepatuhan kelompok sasaran bukan satu-satunya yang memiliki wewenang ini. Oleh karena itu, mencapai implementasi yang sukses melibatkan kesepakatan di antara semua pihak tentang tujuan yang harus dicapai serta kesediaan mereka untuk membantu.

Kesesuaian implementasi atau penerapan kebijakan dengan rancangan, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang baik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, dapat digunakan untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan telah diimplementasikan. Salah satu tahapan terpenting dalam proses pembuatan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Ini menyiratkan bahwa efektivitas proses kebijakan di mana tujuan dan dampak kebijakan dapat dihasilkan tergantung pada seberapa baik kebijakan itu diimplementasikan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, memahami apa yang harus terjadi setelah sebuah program diakui valid untuk dirumuskan dalam contoh ini, upaya untuk mengelolanya dan memberikan dampak nyata pada masyarakat merupakan elemen mendasar dari implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan kebijakan dengan harapan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan (Sulila, 2015:59).

Dalam model yang dikembangkan oleh Edward (Agindawati, 2019:95–105) terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi diperlukan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan dapat lebih konsisten dalam menjalankan semua kebijakan yang akan diberlakukan di masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, ada tiga kriteria komunikasi yang efektif: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Staf, pengetahuan, kekuasaan, dan fasilitas adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi.
3. Disposisi, yaitu Setiap kebijakan memerlukan pelaksana yang memiliki keinginan yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk dapat mencapai tujuan kebijakan yang dimaksud, maka disposisi secara khusus merupakan sikap dan komitmen pelaksana terhadap program yang harus dijalankan. Sejauh mana pelaksana memahami kebijakan, arah dan tanggapan pelaksana, dan intensitas tanggapan atau tanggapan pelaksana merupakan komponen utama dari variabel ini.
4. Menurut Edward, struktur birokrasi merupakan alat manajemen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan suatu kebijakan (SOP).



Gambar 2. 1. Hubungan Antarvariabel Implementasi Kebijakan Edward

Sumber: (Seputra, 2020)

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang terimplementasi.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Melibatkan orang atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan menawarkan jawaban alternatif untuk program pembangunan yang dijalankan pemerintah disebut sebagai keterlibatan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan ide, informasi, sumber daya, waktu, uang, atau bahan. Setiap orang memiliki kapasitas untuk mengekspresikan pikiran mereka dan membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sebagai hasil dari keterlibatan. Pandangan yang berbeda memandang partisipasi sebagai alat

untuk mengelola kegiatan dengan baik dan sebagai cara untuk menerapkan kebijakan (Mulyadi, 2020:13–18).

Kerjasama pemerintah dan masyarakat digunakan untuk menghasilkan hasil pembangunan, termasuk keterlibatan. Melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keseluruhan proses kegiatan. Istilah "partisipasi" menggambarkan bagaimana orang atau kelompok terlibat dalam proses pembangunan, baik dengan kata-kata atau perbuatan, menyumbangkan waktu, ide, informasi, sumber daya, dan/atau bahan, serta menggunakan dan menghargai hasilnya (Ruru et al., 2019:14–24).

Berdasarkan hal tersebut menurut Sumaryadi (2010) partisipasi dalam hal ini termasuk memberikan ide, waktu, tenaga, pengetahuan, sumber daya, dan/atau bahan, serta mengambil bagian dalam menggunakan dan menghargai hasil pembangunan. Partisipasi juga mengacu pada keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan melalui pernyataan atau tindakan. (A. Rahman, 2022:47).

Sama halnya menurut Dewi, Fandeli, dan Baiquni (2013) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat mencakup semua tahapan proses pembangunan, termasuk perencanaan awal, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat adalah penerima fasilitas dan manfaat serta tujuan pembangunan berkelanjutan (Muhammad Afdhal Askar, 2021:105)

Sedangkan menurut Tilaar dalam (Purba et al., 2022:117) yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah tujuan untuk meningkatkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang di dalamnya diupayakan upaya-upaya antara lain diperlukannya perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam diri seorang individu baik dalam kelompok atau perorangan yang ikut serta dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi maupun non-instansi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Sundariningrum (Rumengan et al., 2021) yang membagi partisipasi menjadi dua kelompok berdasarkan modus keterlibatan, ada banyak jenis partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. yaitu:

- 1) Keterlibatan langsung adalah partisipasi yang terjadi ketika orang menunjukkan perilaku tertentu selama proses partisipasi. Ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, mendiskusikan topik, atau memprotes keinginan atau pernyataan orang lain, keterlibatan ini terjadi.
- 2) Ketika orang mengalihkan hak partisipasinya kepada orang lain, itu disebut sebagai partisipasi tidak langsung.

Cohen dan Uphoff mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat kategori, termasuk partisipasi pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan mencari tahu bagaimana mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan

dengan berbagai keputusan yang berkaitan dengan pemecahan masalah dengan kepentingan bersama. Karena masyarakat berhak menentukan arah dan orientasi pembangunan, maka partisipasi dalam pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Terbukti dengan partisipasi dalam pertemuan, partisipasi dalam debat, pengajuan ide, dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diusulkan, cara pelaksanaan pengambilan keputusan ini sangat penting (Andreeyan, 2014).

Partisipasi dalam pelaksanaan program pertama melibatkan penggalangan dana dan sumber daya, koordinasi dari tiga kelas program dan dua tugas administrasi. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan acara. Yang ketiga adalah mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Keluaran suatu program dapat digunakan untuk menentukan keberhasilannya, dan kualitas keluaran dapat menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sepanjang kualitas dan kuantitasnya, dan sepanjang pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang berkualitas, maka keterlibatan tersebut tidak dapat dipisahkan. Yang keempat adalah mengambil bagian dalam penilaian. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini dikaitkan dengan masalah pelaksanaan program secara keseluruhan. Dengan ikut serta, Anda dapat menentukan apakah program dijalankan sesuai dengan desain aslinya atau apakah ada variasi (Givana et al., 2022).

Menurut Cohen dan Uphoff, teori partisipasi secara singkat mencakup:

1. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang terkait dengan mengembangkan ide-ide lain untuk konsep-konsep yang memiliki minat yang sama dengan masyarakat. Misalnya dalam pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan, penentuan logistik vaksin, dan pengumpulan informasi target imunisasi.
2. Partisipasi dalam mobilisasi sumber daya selama pelaksanaan, seperti keterlibatan masyarakat selama pelaksanaan program kecelakaan dan tahap persiapan vaksinasi.
3. Kesuksesan (output) suatu program dapat terlihat jika peserta memanfaatkan manfaat yang diperoleh, terutama dari segi kualitas. Sementara itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang tinggi ditunjukkan dari segi kuantitas.
4. Berpartisipasi dalam evaluasi dengan melacak bagaimana imunisasi disiapkan dan diberikan, membuat laporan, dan mengevaluasi vaksinasi (Sahir et al., 2021:83).

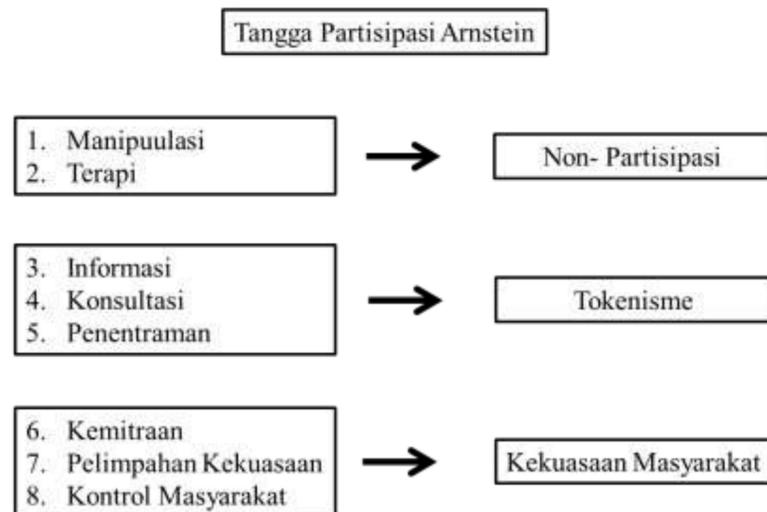
Menurut penelitian sebelumnya, mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah hak dan tanggung jawab. Benar bahwa seseorang memiliki pilihan untuk menerima vaksinasi atau tidak; Namun demikian, mengingat sifat pandemi virus COVID-19, ia juga memiliki pilihan layanan medis mana yang ingin ia gunakan. Selain itu, kebebasan ini dapat dibatasi untuk tujuan nasional lebih lanjut jika seseorang yang tidak diimunisasi berpotensi menyebarkan virus ke orang lain (Gandryani & Hadi, 2021).

Arnstein (1969) mengajukan teori yang disebut *The Ladder of Engagement Theory*, yang menggambarkan gradasi atau pentahapan keterlibatan komunitas, untuk menentukan tingkat partisipasi dalam masyarakat. Ia membaginya menjadi delapan tahap, antara lain:

- 1) Manipulasi, atau pelaksanaan rencana pembangunan di Musrenbang yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan.
- 2) Terapi, atau pemberian informasi tentang perencanaan pembangunan kepada perwakilan masyarakat tanpa tanggapan apapun.
- 3) Informasi, dengan kata lain, pada tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi atau sosialisasi, tetapi hanya sebagai formalitas untuk menyebarkan informasi guna mendapatkan dukungan publik atas semua program yang telah dijalankan.
- 4) Konsultasi, di mana pemerintah melakukan negosiasi dengan rakyat untuk membangkitkan kepentingan rakyat dan memperkuat legitimasi. Meskipun pemerintah mempertimbangkan saran dari publik, itu membuat keputusan akhir.
- 5) Peredaan, dimana pemerintah mengakui pemikiran, gagasan, dan kritik masyarakat tetapi tetap melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Fase ini dijelaskan oleh Arnstein sebagai salah satu formalitas dan rasa hormat.

- 6) Kemitraan, Pada titik ini, pemerintah menunjuk masyarakat sebagai rekan kerja untuk tawar-menawar dan bekerja sama untuk menetapkan dan melaksanakan rencana pembangunan.
- 7) Kekuasaan didelegasikan, pada titik ini masyarakat diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan perencanaan pembangunan.
- 8) Kontrol masyarakat, mengacu pada fakta bahwa pada titik ini masyarakat memiliki kontrol atas seberapa baik kinerja pemerintah, terutama dalam menilai inisiatif perencanaan pembangunan (Hutahayan, 2019:103).

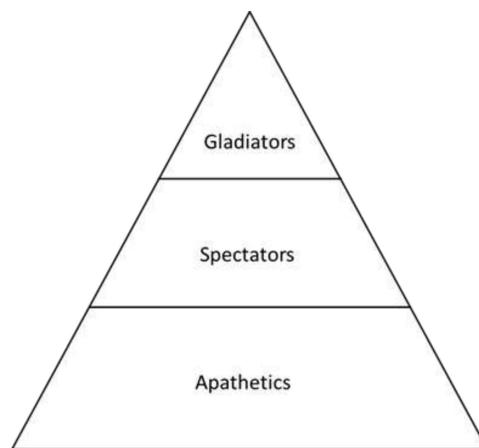
Kedelapan fase ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menentukan keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah berikut digambarkan dalam gambar tangga partisipasi Arnstein:



Gambar 2. 2. Tangga Partisipasi teori Arnstein

Tingkat partisipasi menurut Milbrath dan Goel (Azzuhri, 2022) mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan partisipasi, diantaranya yaitu:

1. Pemain (*Gladiator*), juga dikenal sebagai individu yang aktif berpolitik, seperti komunikator, ahli interaksi tatap muka, aktivis partai, dan pekerja.
2. Penonton (*Spectators*) Mereka yang sekurang-kurangnya pernah mengikuti pemilihan umum sebagai pemantau.
3. Apatitis (*Apathetics*), atau mereka yang menjauhkan diri dan melepaskan diri dari aktivitas politik.



Gambar 2. 3. Tingkat Partisipasi teori Milbrath dan Goel

Menurut Sumampuw, Department for International Development's (DFID) *Guide to Implementing a Participatory Approach* memuat konsep partisipasi (Anggara, 2013) yaitu:

1. Perlindungan.
2. Kemitraan dan kesetaraan (*Equal Partnership*)
3. Keterbukaan.
4. Distribusi kekuatan (atau kekuatan) yang setara.
5. Tanggung Jawab Bersama (*Equality of Responsibility*)

6. Kemandirian.
7. Kompatibilitas.

Beberapa faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat (Hadi Suroso, 2014) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Demografi yaitu usia. Usia ditentukan dengan menambahkan ulang tahun seseorang ke tanggal lahirnya. Usia dapat menjadi kriteria untuk menentukan apakah seseorang dianggap dewasa atau tidak; seiring bertambahnya usia, tingkat kedewasaan dan kapasitas Anda untuk berpikir dan bekerja secara mandiri akan meningkat.
- b. Faktor Ekonomi meliputi:
 - 1) Pekerjaan yaitu kegiatan dalam rangka menopang kehidupan seseorang maupun keluarga yang dilakukan secara berulang, banyak tantangan dan menyita waktu.
 - 2) Pendapatan yaitu jumlah uang atau nilai ekonomi yang diperoleh atau diperoleh oleh seseorang, perusahaan, atau lembaga dalam suatu periode tertentu dari aktivitas atau sumber tertentu.
- c. Faktor Pendidikan adalah ketika seseorang menuntut pertumbuhan orang lain dalam mencapai tujuan dan menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai keselamatan atau kesejahteraan.
- d. Faktor Keinginan, yaitu hasrat seseorang yang jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan.
- e. Faktor Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh individu atau individu dalam bidang tertentu.

Pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga sebagai subjek atau pelaku pembangunan dengan kemampuan dan motivasi yang dapat diandalkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat. Dalam skenario ini, tiga faktor kunci menentukan partisipasi masyarakat:

1. Anggota komunitas memiliki kesempatan untuk mengambil bagian. Kenyataannya, karena masyarakat tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi, banyak proyek pembangunan yang tidak memerlukan keterlibatan masyarakat. Selain itu, sering dianggap bahwa komunitas yang lebih besar tidak cukup mendapat informasi tentang kapan dan bagaimana mereka akan berpartisipasi.
2. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi didasarkan pada bagaimana mereka melihat diri mereka berkontribusi atau meningkatkan kehidupan mereka.
3. Masyarakat bisa berpartisipasi. Jika komunitas tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi, tidak ada peluang yang diberikan atau dikembangkan untuk memobilisasi keterlibatan komunitas yang akan berguna. (Agow et al., 2017).

2.1.3 Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk secara aktif menciptakan (meningkatkan) kekebalan terhadap suatu penyakit. Akibatnya, jika terkena

penyakit ini atau wabah di masa depan, kemungkinan hanya akan berdampak kecil atau berperan sebagai sumber penularan dan hanya menimbulkan penyakit ringan (Covid19.go.id, 2021). Namun, maraknya berita bohong yang beredar di media sosial membuat banyak orang tidak bisa mendapatkan vaksin selama proses implementasi.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah atau Swasta, adalah sebagai berikut:

- 1) Puskesmas, Puskesmas Pembantu
- 2) Klinik
- 3) Rumah Sakit dan/atau
- 4) Unit Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Puskesmas dan Dinas kesehatan Kabupaten dan Kota juga dapat membuat tempat pelayanan imunisasi COVID-19. Disarankan agar setiap sasaran memperoleh rincian tentang jadwal pelayanan setiap fasilitas kesehatan atau pos pelayanan imunisasi terlebih dahulu. Untuk mencapai herd immunity, pemerintah Indonesia ingin memastikan program imunisasi COVID-19 menjangkau setidaknya 208.265.720 penduduk. Melalui perjanjian bilateral dan multilateral, seperti COVAX Facility dengan GAVI dan WHO, atau melalui donasi dari negara sahabat, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan vaksin ini.

Sepuluh varietas vaksin COVID-19, termasuk yang diproduksi oleh Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Sputnik-V,

Janssen, Convidencia, dan Zifivax, telah diberikan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Jumlah dosis dan interval pemberian, serta berbagai platform vaksinasi virus yang tidak aktif, berbasis RNA, vektor virus, dan subunit protein semuanya spesifik untuk masing-masing jenis vaksin ini. Melalui situs resminya, pemerintah menyebarluaskan informasi tentang manfaat vaksinasi COVID-19 sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi imunologi.
2. Penurunan risiko penularan
3. mengurangi efek parah virus
4. Kembangkan kekebalan kelompok. (Unit Pelayanan Kesehatan, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode	Temuan
1	Herman (2019)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene	Penelitian Kualitatif	Temuan studi tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan rencana pembangunan desa sampai setelah rencana tersebut dilaksanakan sepenuhnya. Di Desa Ulidang Kecamatan

				<p>Tammero'do masyarakat cukup aktif dalam memberikan informasi dan memberikan pendampingan pemikiran yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Namun, mayoritas masyarakat tidak aktif menghadiri musyawarah, kurang aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, dan kurang aktif dalam memberikan informasi dan bantuan pemikiran yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.</p>
2	Luce Dwi Nanda, Firwan Tan & Melinda Noer (2018)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyelamatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau Meninjau	Penelitian Kualitatif	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat yang informatif ada pada tahap perencanaan program, tingkat konsultasi ada pada tahap implementasi, dan tingkat terapi hanya ada pada tahap pemantauan dan evaluasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang lestari, kurangnya komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah, serta</p>

				<p>kurangnya komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan penyelesaian adalah beberapa permasalahan lingkungan lestari Danau Maninjau. Pengelolaan masalah lain termasuk keterbatasan lahan untuk usaha, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan sedikitnya kesempatan kerja, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada kandang, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.</p>
4	Timbul Dompok, Nikita Simarmata (2017)	Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Batu Aji Kota Batam	Penelitian Kuantitatif	<p>Temuan menunjukkan bahwa sementara sikap memiliki pengaruh yang kecil terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, pengetahuan memiliki pengaruh yang terbatas terhadapnya. Namun pada saat yang sama, sikap dan pengetahuan berperan dalam bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam mengelola bank sampah. Pengetahuan dan sikap memiliki nilai R squared sebesar 0,488 yang menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi sebesar 48,8% terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.</p>

5	Andi Mulawangsa Mappakalu, Nursaifullah (2022)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan penghijauan kota di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai	Penelitian Kualitatif	Temuan studi tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam melestarikan penghijauan kota di Kabupaten Sinjai Utara, ibu kota negara Sinjai, mengungkapkan bahwa sangat sedikit keterlibatan dalam melestarikan penghijauan di sepanjang pinggir jalan. Menurut perkiraan, 50% pohon tanaman hijau perkotaan mati secara alami antara tahun 2007 dan 2017 atau ditebang oleh masyarakat karena akar pohon yang besar, yang menyebabkan kerusakan pada banyak rumah pemilik rumah, dan daunnya yang tersebar, yang menyulitkan penduduk setempat untuk membersihkan sampah daun. Selain itu, warga khawatir pohon tumbang karena rawan terjadi saat diterpa angin kencang. Masalah lainnya adalah adanya kabel listrik yang meliuk-liuk di dahan pohon, dan mereka mengkhawatirkan pemadaman listrik dan keselamatan pengguna listrik.
6	Muhammad Bayu Dwi Cahyo (2015)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014	Penelitian Kualitatif	Dibandingkan dengan Pemilu Legislatif tahun 2009, temuan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Godong

			<p>Kabupaten Grobogan dari 67% menjadi 69%. Masyarakat memilih partai politik dengan melihat prestasi dan kinerja individu atau anggota yang tergabung dalam partai tersebut, bukan karena fanatik terhadap partai tersebut. Tingginya angka golput di Distrik Godong sebagian disebabkan oleh padatnya penduduk perkotaan. Golput adalah hak asasi manusia, tetapi jika seseorang tidak dapat memberikan suara karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), itu adalah pelanggaran hak asasinya karena menghilangkan kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban kewarganegaraan untuk berpartisipasi dalam politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan agak meningkat pada tahun 2014.</p>
--	--	--	---

7	Daniel Collyn Damanik (2019)	Analisa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Obyek Wisata di Kabupaten Simalungun	Penelitian Kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Girsang Sipangan Bolon sebagai daya tarik wisata di Parapat, sebagian besar masih bersifat pasif. Tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran masyarakat, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta pola peradaban dan kehidupan sosial di Parapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Parapat.
---	------------------------------	--	-----------------------	---

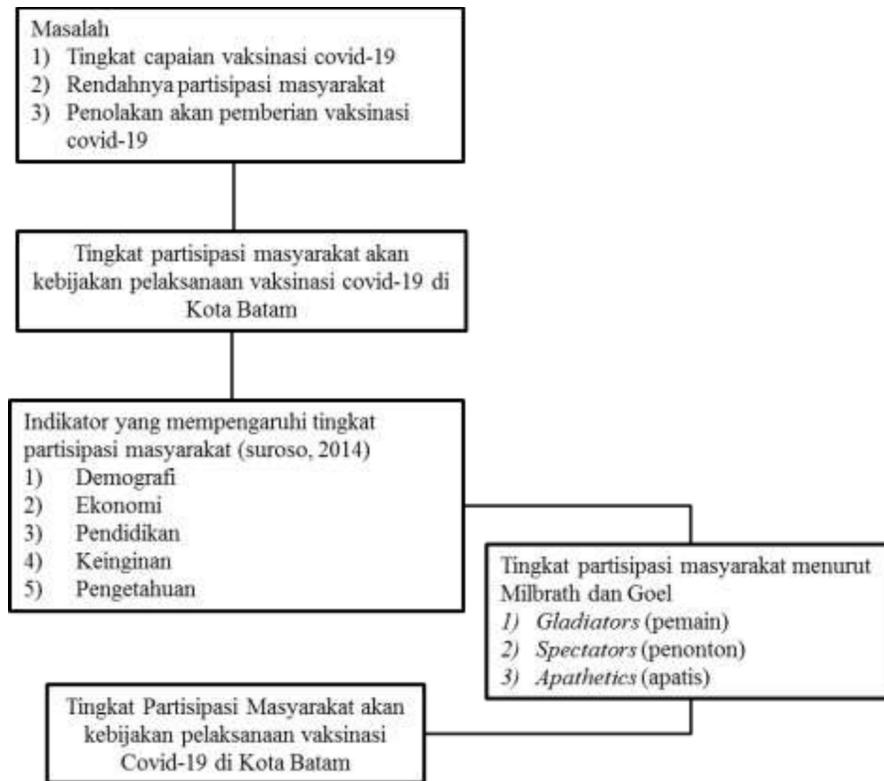
8	Sri Wahyuni (2012)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulungagung	Penelitian Kualitatif	Menurut temuan studi, keterlibatan masyarakat dalam fenomena inisiatif umumnya berada pada level placation karena masyarakat dapat menyarankan kegiatan, namun dalam beberapa kasus, keputusan akhir dibuat oleh pemerintah. Namun, Beji berada pada tingkat konsultasi, di mana pemerintah membuat keputusan akhir meskipun mengumpulkan ide-ide masyarakat. Karena masyarakat kini dapat melakukan kegiatan pemetaan swadaya secara mandiri dengan tetap berpegang pada norma-norma yang telah ditetapkan, maka pemetaan swadaya berada pada level kemitraan ditinjau dari kriterianya. Masyarakat sudah mulai berpartisipasi dalam pendanaan, meskipun sangat kecil, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembiayaan saat ini rata-rata berada pada tingkat konsultasi. Di Desa Beji dan Karangwaru, keterlibatan masyarakat dalam mobilisasi staf pada saat rapat berada pada level delegated power, sedangkan di Desa Sembung dan Kampungdalem berada pada level kemitraan. Implementasi praktis,
---	--------------------	---	-----------------------	---

			<p>bagaimanapun, terjadi pada tingkat kekuatan yang didelegasikan di lima lokasi. Di kelima lokasi tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah berada pada level Kemitraan. Pentingnya dukungan pada tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin fungsi infrastruktur yang dibangun tetap terjaga merupakan salah satu rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sekarang penting bagi pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator ketika menjalankan program. Oleh karena itu, kemampuan fasilitator lapangan, terutama yang dipilih dari dalam masyarakat, untuk menggerakkan masyarakat harus diperkuat.</p>
--	--	--	---

9	Feti Fatimatuazzahroh, SudhartoP.Hadi & Hartuti Purnaweni (2021)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Analisis Aktor pada Rehabilitasi Mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	Penelitian Kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa program pemulihan mangrove Karangsong telah mencapai tahap kekuatan warga. Tahapan ini menunjukkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi rehabilitasi mangrove. Hasil analisis aktor yang dilakukan menggunakan UCINET menunjukkan hal ini, menunjukkan bahwa Kelompok Tani Pantai Lestari adalah pemain kunci dalam regenerasi mangrove. Selain perencanaan, mereka berfungsi sebagai fasilitator dan sumber informasi penting bagi berbagai pemain dan pemangku kepentingan. Pengelolaan mangrove masih membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah diperkirakan akan terus berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove untuk memastikan kelestariannya.
---	---	---	--------------------------	---

Sumber: Berdasarkan Studi Literatur

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 4. Kerangka Berfikir